

Model Kebijakan Pemberdayaan Perempuan di Bali

Oleh : Dr. Ni Putu Tirka Widanti

1. Pengantar

Globalisasi selain memberikan dampak positif juga membawa dampak negatif dengan timbulnya berbagai masalah baru bagi suatu negara. Untuk mengatasi masalah yang timbul, dibutuhkan peran perempuan Indonesia, termasuk perempuan Bali. Berbagai ikatan tradisi yang mengungkung, kuasa kelahiran yang kemudian berjalan menyimpang dalam melaksanakan peran yang mengacu pada sistem patriarki, harus dikoreksi dan direvisi. Peran perempuan harus diangkat pula dalam komunitas banjar. Namun, bagi perempuan Bali, mengambil peran itu tidak mudah karena dalam tatanan adat masyarakat Bali, aktor utama dalam struktur adat adalah anak laki-laki, yang dikenal sebagai *purusa*. Sekuat apa pun perjuangan perempuan, hasilnya tetap di posisi pinggir, kecuali jika dilakukan perombakan

Pemberdayaan perempuan kadang-kadang menemui kendala sosiokultural yang memojokkan para perempuan Perempuan justru menghadapi himpitan tekanan dengan kepasrahan dan menanggapinya sebagai hal yang wajar bagi mereka. Peluang serta tantangan perempuan Bali dalam mengejar kemajuan agar sejajar dengan kaum laki-laki rupanya masih menjadi keluhan Fakta di masyarakat menunjukkan bahwa perempuan Bali masih terbelakang dibandingkan dengan laki-laki di bidang pendidikan, karier, pekerjaan, dan dunia politik.

Perempuan Bali harus berusaha keras untuk bisa berperan dan "tampak" dalam kehidupan sehari-hari. Jika perempuan Bali ingin berperan lebih jauh lagi,

diperlukan kemampuan berpikir strategis, seperti dalam dunia politik yang merupakan ruang-ruang yang memerlukan kapasitas itu atau dalam peran pengambil keputusan orang yang bisa mencapai tataran berpikir strategis adalah orang yang terlatih berpikir dan memiliki kemerdekaan dan keberanian menyatakan pendapat, sebagaimana disebutkan dalam Weda.

Perempuan Bali saat ini dalam masa transisi Mereka jarang berada di posisi strategis ini karena mereka tidak punya keberanian menyatakan pendapat. Adat mengatur bahwa perempuan tidak punya hak suara, termasuk hak suara dalam pasamuhan (rapat yang berhubungan dengan adat atau keagamaan di Bali) Pada umumnya kaum perempuan tidak ikut dalam rapat pada tingkat desa pakraman dan banjar, sehingga urusan desapublik diputuskan oleh kaum laki-laki tanpa suara perempuan ikut menentukan. Pada zaman dahulu mungkin hal itu baik karena situasi zaman memang menghendaki perempuan berada dalam posisi seperti itu. Namun, ketika zaman berubah, dan justru membutuhkan orang-orang yang bisa "bicara" (terbuka), tradisi yang memiliki aturan demikian harus dikaji ulang untuk mengikuti perubahan zaman Hal ini dapat dimengerti sebab dampak keterbungkaman (tidak pernah bicara) itu sangat besar, dan akhirnya terbukti bahwa ketika peran mereka dibutuhkan, perempuan Bali benar-benar tidak bias "bicara".

II. Konsep Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Dalam pembahasan mengenai gender, kesetaraan gender, dan keadilan gender, dikenal adanya dua teori, yaitu a) Teori Nature dan (2) Teori Nurture. Dalam perjalanannya dikembangkan satu konsep teori yang diilhami oleh dua

teori tersebut yang merupakan hasil kompromistis yang menciptakan keseimbangan yang disebut dengan Teori Equilibrium. Selanjutnya, ketiga teori secara rinci diuraikan sebagai berikut.

Teori Nature

Teori Nature sering diterjemahkan sebagai Teori Alam atau Teori Kodrat. Menurut Teori Nature, perbedaan perempuan dan laki-laki adalah kodrat, suatu kenyataan biologis, sehingga perbedaan itu harus diterima, tidak perlu digugat, apalagi ditolak. Perbedaan biologis itu memberikan indikasi bahwa diantara kedua jenis tersebut diberikan peran dan tugas yang berbeda. Ada peran dan tugas yang dapat dipertukarkan, tetapi ada yang tidak bisa karena memang berbeda secara kodrat alamiahnya.

Dalam proses perkembangannya banyak kaum perempuan sadar terhadap beberapa kelemahan Teori Nature, lalu beralih ke Teori Nurture. Akan tetapi, ternyata Teori Nurture dirasa tidak menciptakan kedamaian dan keharmonisan dalam hidup berkeluarga dan bermasyarakat. Perbedaan biologis diyakini memiliki pengaruh pada peran yang bersifat naluri (*instinct*). Perjuangan kelas tidak pernah mencapai hasil yang memuaskan, karena manusia memerlukan kemitraan dan kerja sama secara struktural dan fungsional. Manusia baik perempuan maupun laki-laki memiliki perbedaan kodrat sesuai dengan fungsinya masing-masing. Dalam kehidupan sosial terdapat pembagian kerja (*division of labor*) secara seksual. (Budiman, 1981; 1991). Begitu pula dalam kehidupan keluarga, harus ada kesepakatan antara suami dan istri.

Teori Nurture

Teori Nurture sering diterjemahkan sebagai Teori Kebudayaan (Budiman, 1981) Menurut Teori Nurture, perbedaan perempuan dan laki-laki pada hakikatnya adalah hasil konstruksi sosial budaya, sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Perbedaan itu menyebabkan selalu tertinggal dan terabaikannya peran dan kontribusi perempuan dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Konstruksi sosial menempatkan perempuan dan laki-laki dalam perbedaan kelas. Laki-laki diidentikkan dengan kelas boruis, sedang perempuan ditempatkan sebagai proletar. Perjuangan untuk persamaan dipelopori oleh kaum feminis internasional yang cenderung mengejar persamaan (*sameness*) dengan konsep 50:50 (*fifty-fifty*), konsep yang kemudian dikenal dengan istilah *perfect equality* (kesamaan kuantitas, kesamaan sempurna). Perjuangan tersebut sulit dicapai karena berbagai hambatan, baik dari nilai agama maupun budaya

Berangkat dari kenyataan tersebut, para feminis berjuang dengan menggunakan pendekatan sosial konflik, yaitu konsep yang diilhami oleh ajaran Karl Marx (1818-1883) Mengapa teori ini memakai pendekatan konflik dari Karl Mark tidak terlalu mengejutkan sebab terminologi yang dipakai pun- misalnya *proletar* dan *borjuis*-sudah menunjukkan bahwa teori ini terpengaruh secara kuat oleh bayang-bayang Marxisme. Akan tetapi, jika boleh dipuji, sebagai teori, Teori Nurture amat konsisten memegang prinsip bahwa ketimpangan gender yang melahirkan ketidakadilan sosial sesungguhnya merupakan akibat dari konstruksi sosial. Dengan kata lain, perbedaan peran, kewajiban, dan nasib antara perempuan dan lelaki bukanlah kodrat, tetapi merupakan hasil konstruksi sosial.

(Budiman, 1981; Fakhri, 2005). Karena konstruksi sosial itu bukan kodrat, melainkan diciptakan masyarakat, justru di sini orang harus yakin bahwa perbedaan gender dapat berubah dan diubah dan tentu tidak sia-sia untuk diperjuangkan.

Randall Collin (1987), beranggapan bahwa keluarga adalah wadah legal pemaksaan suami sebagai pemilik terhadap istri sebagai abdi. Margareth Eichlen beranggapan bahwa keluarga dan agama adalah sumber terbentuknya budaya dan perilaku diskriminasi gender. Konsep sosial konflik menempatkan kaum laki-laki sebagai kaum penindas (*borjuis*) dan perempuan sebagai kaum tertindas (*proletar*) bagi kaum proletar, tidak ada pilihan kecuali harus melancarkan

perjuangan menyingkirkan penindas demi mencapai kebebasan dan persamaan. Karena itu, Teori Nurture melahirkan paham sosial konflik yang banyak dianut masyarakat sosialis komunis yang menghilangkan strata hierarkis penduduk untuk mencapai situasi "sama rata, sama rasa" (*egalitarian*).

Teori Equilibrium (Keseimbangan)

Di samping kedua teori sebelumnya, terdapat satu teori lagi yang lahir dari kesediaan untuk menciptakan suasana kompromitis yang dikenal dengan Teori Keseimbangan (*Equilibrium Theory*). Teori ini menekankan konsep kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki. Dalam relasi tersebut, keduanya harus bekerja sama dalam kemitraan dan keharmonisan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk mewujudkan hal tersebut, dalam setiap kebijakan dan strategi pembangunan harus diperhitungkan

keseimbangan peran perempuan dan laki-laki. Hubungan di antara kedua elemen tersebut bukan merupakan hubungan yang saling bertentangan, melainkan hubungan komplementer yang saling melengkapi.

Teori Keseimbangan juga memandang bahwa berbagai keragaman (factor biologis, etnis, aspirasi, pilihan, budaya, dsb) pada hakikatnya adalah realitas kehidupan manusia. Hubungan laki-laki dan perempuan bukan dilandasi konflik dikotomis, bukan pula struktural fungsional, tetapi lebih dilandasi kebutuhan kebersamaan guna membangun kemitraan yang harmonis, karena setiap pihak punya kelebihan sekaligus kekurangan, kekuatan sekaligus kelemahan. Kedua pihak, dengan demikian, harus bekerja sama untuk saling mengisi dan melengkapi kekurangannya (cf. Tinker, 1990, Wahyuningsih, 1993; Wijaya, 1995).

III. Pandangan Budaya Bali terhadap Perempuan

Masalah yang paling krusial dari perempuan adalah persoalan bagaimana mengangkat derajat/peran perempuan. Selama ini perempuan selalu diletakkan sebagai pihak lemah, sebagai warga kelas dua, tetapi kalau perempuan terus memikirkan itu, kemudian berontak, dan terus berusaha mendapatkan tempat, akhirnya perempuan Bali akan kehabisan tenaga untuk memperjuangkan hal tersebut. Penulis justru menganjurkan kepada perempuan Bali agar berhenti menyebut diri kelas dua, kelas pinggiran. Perempuan hendaknya berbuat sesuatu yang bisa menimbulkan pandangan bahwa perempuan tidak bisa seperti yang mereka duga. Kalau kaum perempuan Bali sudah memperlihatkan diri dalam pendidikan, dalam peranan di rumah tangga, maupun dalam aktivitas di

masyarakat, secara otomatis para laki-laki tidak akan berpikir “dia itu seorang perempuan”, tetapi lelaki akan berpikir “dia itu orang yang mampu”.

Masyarakat Bali tidak pernah menempatkan perempuan sebagai perempuan lemah. Tidak ada orang tua yang mengajarkan anak laki-laknya, “Tolong bantu adikmu yang perempuan yang lebih lemah darimu”. Justru masyarakat Bali mendidik anak-anaknya, laki-laki maupun perempuan, secara sama. Orang tua lebih menekankan pendidikan di rumah dari pada anak perempuannya karena ia akan meninggalkan keluarganya mengikuti keluarga suami. Anak perempuan diberikan pendidikan lebih keras dengan harapan ia akan membawa nama keluarga. Jangan sampai memalukan keluarga. Jangan sampai kehadirannya dicemoohkan, dikatakan dari keluarga yang biasanya hanya menandahkan tangan saja, tidak bisa bekerja membantu keluarga. Bisa dilihat dalam aktivitas sehari-hari di rumah, perempuan memasak, mengatur semua. Hanya dalam upacara besar, yang memasak bukan perempuan, melainkan laki-laki.

Perempuan menjalankan kodratnya; perempuan tentu akan hamil. Kalau ingin melahirkan anak-anak yang berkualitas, perempuan-perempuan itu mesti bisa merencanakannya. Kalau menginginkan anak yang sehat, berapa jumlahnya, perempuan harus merencanakan bersama suaminya. Kemudian, dalam perencanaan itu mempersiapkan diri karena selama bayu dalam kandungan, seorang ibu sudah mulai menanamkan dasar kepribadian untuk anaknya. Dalam hal ini, perempuan maupun laki-laki dapat mempersiapkan diri dalam keadaan tenang. Mereka tidak boleh membawa karma masa lampau, sehingga di dalam

melahirkan anak, tidak lagi berada dalam keadaan tegang, cemas, ataupun bingung. Setelah merasa diri benar-benar siap, barulah perempuan mewujudkannya secara sadar bersama suaminya.

Masyarakat Hindu di Bali memandang perempuan bukan sebagai makhluk lemah yang harus dilindungi. Perempuan dianggap mempunyai kekuatan yang sangat besar yang dapat menciptakan keindahan, tetapi dapat pula “membahayakan” kehidupan di dunia ini. Untuk mereka yang ingin melepaskan diri dari keduniawian, seperti tercantum dalam Sarascamuschaya, “Hendaknya menghindari dan bahkan kalau mungkin dalam kenangan pun menghapuskan bayangan perempuan”. Teks ini menggambarkan demikian takutnya laki-laki pada kekuatan magis perempuan yang dianggap dapat meluluhkan keteguhan iman dan memperlemah semangat juangnya untuk bertapa dan menyatu dengan Tuhan.

Sejak kecil orang tua menanamkan pendidikan kepada anaknya bahwa seorang anak harus menghormati orang tuanya, orang yang lebih tua, orang lain dan makhluk lainnya di dunia, berbakti pada leluhur, serta menyembah Hyang Wudu Wasa atau Tuhan Yang Mahaesa beserta manifestasinya. Rasa hormat adalah dasar untuk mencapai hubungan baik dengan sesama, leluhur, dan Tuhan sebagai Maha Pencipta. Dengan adanya hubungan baik, akan tercapai keharmonisan dan keseimbangan antara buana alit, buana agung dan Hyang Wasa yang akan membuahkan kebahagiaan lahir dan batin pada diri manusia.

Tidak banyak orang luar Bali yang mengetahui bahwa di beberapa tempat di Bali ada yang mempunyai kebiasaan “beda”, yakni seorang suami memasak makanan untuk keluarganya setelah selesai bekerja di sawah, sedangkan istrinya

berjualan di pasar sampai sore hari. Ini merupakan bentuk pembagian kerja (division of labour) yang beritik tolak dari situasi. Jika orang luar termasuk para pengamat dan peneliti sejak awal di kepalanya sudah terpola dengan konsep umum pembagian kerja secara seksual (sexual division of labour)(Beneria, 1979,Budiman,1981), apa yang bisa dikatakan mereka tentang realitas "lain" ini. Di sini terbukti bahwa tidak selamanya pandangan mengenai kultur patriarki dapat tepat digeneralisasikan untuk dikenakan kepada setiap stnis atau kelompok komunitas.

Untuk melaksanakan ajaran agama Hindu, biasanya perempuan sibuk menyiapkan dan membuat sesajen untuk dipersembahkan kepada para Dewa dan Sang Hyang Widi Wasa, disamping kewajibannya sehari-hari seperti tersebut di atas. Apabila upacara agama yang dilaksanakan itu upacara besar yang melibatkan keluarga besar atau masyarakat di sekitarnya, tugas perempuan hanya membuat sesajen (banten), sedangkan yang mengatur jalannya upacara, mempersiapkan upacara, bahkan memasak serta menyajikan makanan adalah laki-laki. Yang terlibat disini tidak hanya suami-istri, tetapi juga anak-anak yang sudah akil balik.

Keluarga mendambakan adanya anak laki-laki karena anak laki-laki dianggap sebagai (purusa), membantu orang tua waktu usianya lanjut, dan membantu membukakan pintu ke sorga bila orangtuanya telah meninggal. Kalau sudah menikah anak perempuan akan mengikuti suaminya. Keadaan ini menyebabkan orang tua lebih meletakkan harapan sepenuhnya pada anak laki-lakinya. Belakangan ini keluarga Hindu Bali memberikan kesempatan yang sama pada anak-anak perempuan dan laki-laki dalam mengenyam pendidikan formal

karena mereka tidak lagi mempunyai pandangan seperti zaman dahulu bahwa merasa rugi memberikan pendidikan formal yang tinggi kepada anak gadisnya karena toh akan menjadi milik keluarga suaminya. Dengan pendidikan informal yang diremaja di rumah, orang tua lebih menekankan anak perempuannya tinggal di rumah untuk membantu orang tua menyelesaikan urusan rumah tangga, tidak boleh bebas keluar rumah di luar jam-jam sekolah seperti anak laki-laki. Akan tetapi, orang tua Bali tidak pernah menanamkan konsep perempuan sebagai kaum lemah yang mempunyai kemampuan kurang dibandingkan dengan laki-laki. Para orangtua akan mengajarkan nilai bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai tugas masing-masing yang berbeda, tetapi mempunyai kemampuan yang sama.

Orang tua menanamkan kepada anaknya rasa pengabdian pada keluarga dan adanya hukum karma yang dapat mengenai semua orang. Kalau anak gadis telah menikah, apapun yang terjadi harus diterima dengan lapang dada sebagai suatu karma. Keluarga adalah dia atas segalanya, sehingga kebutuhan anak harus lebih didahulukan daripada kepentingan pribadi. Oleh karena itu, perceraian, misalnya, merupakan tindakan yang menjatuhkan martabat keluarga asal gadis tersebut.

Sejak kecil ditanamkan pada diri anak-anak agar menjunjung tinggi harga diri dan martabat keluarga dengan mengharuskan anak gadisnya bekerja agar nanti kala sudah menikah tidak memalukan nama baik keluarga. Kalau naka perempuan menikah-demikian orang tua mendidiknya-jangan menjadi orang yang hanya menerima uang belanja dari suami untuk menghidupi keluarganya; ia harus ikut aktif membantu suami menambah keuangan keluarga; juga ditanamkan sebuah konsep kerja bahwa semua pekerjaan itu mulia asalkan tidak menyalahi norma-

norma masyarakat. Pekerjaan yang dilakukan hendaknya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Dasar inilah yang mendorong perempuan Bali bekerja, yaitu karena harga diri sebagai perempuan yang tidak mau hanya mengandalkan jerih payah suami serta sebagai istri merasa berkewajiban menambah keuangan keluarga, sedangkan sebagian kecil memberi alasan demi karier, untuk mengisi waktu, dan agar bebas dari lingkungan keluarga. Jadi, mereka-para perempuan Bali itu –bekerja keras bukan karena dipaksa oleh suaminya atau keluarga suaminya.

Dengan demikian, dari keluarganya yang beragama Hindu anak perempuan Bali sudah mendapat pengajaran tentang : pentingnya menjunjung tinggi harga diri dan martabat keluarga, kesediaan mengabdikan pada keluarga, kesadaran akan adanya hukum karma, dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai tugas dalam hidupnya. Pendidikan di Bali tidak menekankan bahwa perempuan adalah kaum lemah. Dalam perspektif kultural Bali, perempuan harus hidup dengan harga diri sesuai dengan emansipasi perempuan, tanpa melupakan segi-segi estetik dan tanggung jawab pada keluarga. Tidak ditanamkan pada diri anak bahwa laki-laki adalah competitor (pesaing) dalam hidup. Anak-anak membuktikan hal ini dari kehidupan orang tuanya yang harmonis; anak-anak akan menyaksikan setiap hari bahwa setiap orang berkewajiban mengemban tugasnya dalam rumah tangga dan di dalam masyarakat. Inilah realitas berabad-abad pada masyarakat Bali.

Pada umumnya orang berpendapat bahwa kalau seorang istri bekerja, waktu untuk mengasuh anak dan mengurus rumah tangganya berkurang dan hal ini dapat menimbulkan banyak masalah dalam keluarga karena kelebihan beban pada

perempuan. Namun, ada yang berpendapat bahwa kalau perempuan sudah bekerja di luar rumah, tugas laki-laki dirumah akan meningkat. Di beberapa tempat di Bali ada yang mempunyai kebiasaan bahwa seorang suami melakukan pekerjaan memasak makanan untuk keluarganya setelah selesai bekerja di sawah karena istrinya berjualan di pasar sampai sore hari. Di sini terjadi ”pengalihan beban” pekerjaan rumah dari istri ke suami. Bagaimanakah kenyataan ini dipersepsi oleh orang luar Bali? Bagaimana pula realitas ini diberi makna (diinterpretasikan) oleh para pengamat asing?

Selama perempuan bekerja, yang mengerjakan pekerjaan rumah tangganya adalah anggota keluarga lainnya yang sempat. Tampaknya keluarga inti sudah mulai gotong – royong menyelesaikan kehidupan sehari-hari karena kesulitan mendapatka atau mempunyai pembantu rumah tangga atau sanak keluarga lainnya. Tingginya biaya hidup yang tidak seimbang dengan pendapatan memaksa banyak keluarga inti baru yang belum mapan dalam keuangan untuk belajar menghidupi dirinya sendiri tanpa bantuan pembantu. Ada sebagian perempuan yang harus mengerjakan seluruh pekerjaan rumahnya dan sebagian perempuan lainnya dibantu sepenuhnya oleh pembantu rumah tangga, ipar, mertua, orang tua, atau keluarga lainnya.

Urusan di luar keluarga, seperti urusan dengan banjara tau keluarga besar semua dilaksanakan oleh laki-laki. Perempuan hanya menyampaikan pendapat dan pemikirannya melalui suami karena yang menjadi kepala rumah tangga adalah suami. Pertemuan-pertemuan di masyarakat hanya dihadiri oleh kepala rumah tangga. Dengan adanya program PKK, perempuan mulai dilibatkan dalam

aktivitas di banjar terutama dalam menerima pengetahuan – pengetahuan yang sebagian besar berhubungan dengan pekerjaan untuk menyejahterakan keluarga.

Pandangan perempuan yang menganggap laki-laki sebagai partner atau mitra dalam kerja dan bukan musuh atau pesaing dalam meniti karier adalah modal besar untuk terciptanya ketenangan dalam pekerjaan. Kedudukan dalam kariernya tidak diperoleh perempuan karena iba belas kasihan, atau supaya dikatakan pemerintah Bali telah menjalankan emansipasi, tetapi memang karena perempuan itu mempunyai kemampuan untuk menempati pekerjaan itu. Dengan adanya pandangan ini, kiranya jelas bahwa pembangunan daerah Bali tidak didasarkan atas perebutan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan; pembangunan Bali digerakkan oleh lilelaki dan perempuan sebagai mitra kerja yang sejajar. Kelihatannya ini seperti normative ideal , tetapi sesungguhnya inilah realitas Bali itu!

Peran ganda pada perempuan Bali-Hindu telah tertanam sejak kanak-kanak. Pola asuh dan budaya masyarakat mengarahkan perempuan untuk berperan ganda dalam hidupnya. Perempuan Bali tidak merasakan peran ganda sebagai beban, tetapi sebagai suatu pengabdian untuk menjaga harga diri dan martabat keluarga asalnya. Perasaan ini dapat menjadi ketenangan dalam keluarganya sendiri. Dengan demikian, tidak terjadi benturan antara suami dan istri dalam menjalankan tugas rumah tangganya. Ketenangan dalam keluarga akan menciptakan ketenangan dalam masyarakat. Kondisi ini sangat membantu dalam melancarkan jalanya pembangunan di Bali.

Emansipasi akan dapat dinikmati oleh perempuan dalam segala lapisan apabila kebanyakan perempuan dapat mencapai pendidikan formal sama dengan laki-laki. Perjuangan perempuan dalam emansipasi bukan untuk mendapatkan belas kasih, tetapi ingin memperoleh kedudukan dan penghasilan atas dasar kemauannya. Kiranya perjuangan emansipasi di Bali tidak meninggalkan tugas perempuan sebagai ibu dalam rumah tangga. Di Bali, emansipasi berjalan secara pelan, tetapi pasti, tanpa disertai dengan benturan yang meresahkan masyarakat. Laki-laki dan perempuan yang mempunyai kedudukan dan kemampuan sama memperoleh penghasilan yang sama. Keadaan ini dapat terlihat pada tenaga kerja yang bekerja sebagai tenaga profesional, teknisi dan sejenisnya, dan tenaga kepemimpinan. Namun mereka yang bekerja sebagai tenaga usaha penjualan, tenaga produksi, tenaga usaha pertanian, dan buruh kasar lainnya, yang mengandalkan penghasilan jauh lebih rendah dari pada laki-laki. Alasan yang diberikan oleh pengusaha atau yang menggaji mereka adalah tenaga perempuan lebih lemah dari laki-laki.

Agar dapat berperan aktif dalam pembangunan sejajar dengan kaum laki-laki, perempuan Bali harus tetap mengikuti perkembangan zaman dengan meningkatkan kemampuan melalui pendidikan formal atau nonformal. Aktivitas perempuan Bali dilakukan tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya saja, tetapi juga untuk menyejahterakan dirinya sendiri tanpa meninggalkan identitas sebagai orang Bali. Dilihat dari Sensus Penduduk Bali Tahun 2000 dan survei peran ganda perempuan Bali Hindu di atas, dapat dikatakan bahwa peran perempuan Bali dalam pembangunan di daerahnya sangat besar.

Tenaga kerja perempuan, yang jumlahnya mencapai 43% dari jumlah tenaga kerja di Bali, memberi sumbangan yang seimbang dengan tenaga kerja laki-laki dalam pembangunan Bali. Tenaga kerja perempuan berperan di segala lapangan dan jenis pekerjaan sebagaimana kaum laki-laki. Tenaga kerja perempuan banyak terserap dalam sector perdagangan, rumah makan, hotel. Namun, dalam sector pekerjaan yang menuntut profesionalisme lebih tinggi misalnya sebagai tenaga profesional, teknisi, manajer dan yang sejenis, perempuan jauh tertinggal dari laki-laki. Kemungkinan hal ini disebabkan oleh lebih sedikitnya jumlah perempuan yang memiliki tingkat pendidikan sampai di perguruan tinggi dibandingkan dengan yang dicapai laki-laki (5%) atau memang perempuan kurang berminat mengambil posisi itu.

Emansipasi akan dapat dinikmati oleh perempuan dalam segala lapisan apabila jumlah perempuan yang dapat mencapai pendidikan formal sama dengan laki-laki. Keberhasilan perjuangan perempuan Bali tidak terjadi karena iba dan belas kasihan pihak lain, tetapi terjadi karena perempuan ingin memperoleh kedudukan dan penghasilan berdasarkan kemampuannya. Kiranya perjuangan emansipasi di Bali tidak meniggalkan tugas perempuan sebagai ibu rumah tangga.

Dalam keseharian perempuan Bali tampak tegar, seakan mengambil perannya melebihi peran yang seharusnya ia lakukan. Di rumah ia sebagai perempuan, sebagai istr, sebagai ibu, dan kadang-kadang juga sebagai “bapak”. Dengan demikian, anak-anak mereka melihat ibunya kaum perempuan adalah perempuan kuat, baik fisik maupun mental, jarang anak-anak Bali melihat ibunya cengeng, menangisi nasibnya. Mereka lebih sering menyaksikan ibunya sehari-

hari sebagai perempuan pekerja keras, perempuan kuat, tegar, karena menerima hidupnya sebagai suatu karma yang harus dijalani. Dalam kondisi ketiadaan pilihan kecuali menerima karma tersebut, perempuan Bali berusaha berbuat sesuatu untuk dapat memperbaiki karma berikutnya untuk dirinya dan keluarganya.

Bagi perempuan yang sudah menikah, seluruh hidupnya diperuntukkan bagi keluarganya, yakni anak-anak dan suaminya, sedangkan perempuan yang belum menikah akan memberikan hidupnya untuk keluarga yaitu orang tua dan saudara-saudaranya. Karena hidupnya adalah untuk keluarga, ia akan berjuang untuk keluarganya; dengan atau tanpa diminta suami, istri akan membantu suami menghidupi keluarganya sesuai dengan kemampuannya. Kalau tidak memiliki keahlian apa-apa, disamping mengerjakan pekerjaan domestic, yakni mengurus urusan rumah tangga, ia juga membantu pekerjaan suaminya. Kalau mempunyai keahlian tertentu, ia akan menggunakan keahlian ini untuk mendapatkan uang. Kerja baginya adalah mempertahankan harga diri dan martabat keluarga asal tempat dia dilahirkan. Perempuan Bali bukan orang yang pemalas yang hanya mampu menengadahkan tangan, mengatur apa yang diberikan suami. Perempuan Bali adalah perempuan kreatif yang mampu mengusahakan sesuatu untuk bersama-sama membangun rumah tangga. Keadaan ini sering membuat laki-laki menganggap hal ini sebagai sesuatu yang lumrah kalau perempuan mandiri dalam segala hal.

Banyak orang tua di Bali memberikan kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan di sekolah buat anaknya apakah laki-laki atau perempuan.

Persaingan bebas terjadi antara lelaki perempuan dalam mencapai prestasi sekolah. Bintang – bintang kelas lebih banyak disandang oleh perempuan. Cara belajar perempuan dan laki-laki berbeda; perempuan lebih banyak menghabiskan waktunya untuk belajar, sehingga wajar ia mencapai prestasi lebih tinggi dari pada laki-laki. Aktivitas perempuan dalam organisasi dan masyarakat agak kurang, sehingga kesempatan perempuan untuk mengembangkan daya nalarnya kurang dibandingkan laki-laki. Padahal untuk menjadi seorang pemimpin apakah pemimpin dalam rumah tangga atau di pekerjaan diperlukan kemampuan lain yang hanya mungkin diperoleh dari pengalaman bermasyarakat.

Keterlibatan kaum perempuan dalam dunia politik di Bali sebenarnya sudah tampak jelas sejak zaman kerajaan-kerajaan Bali Kuno. Banyak tokoh perempuan yang tercantum dalam prasasti- prasasti, baik sebagai ratu maupun sebagai pendamping raja. Hal ini tentu tidak lepas dari pengaruh agama Hindu yang tidak mentabukan perempuan untuk terjun dalam dunia politik. Hal ini tampak pula pada saat pemerintah colonial Belanda mengadakan interverensi ke Bali dan mendapat perlawanan dari kerajaan –kerajaan di Bali, yang tidak mau tunduk kepada kekuasaan colonial Belanda. Padasaat itu juga tampil tokoh-tokoh perempuan yang ikut berperang melawan pemerintahan colonial Belanda. Perempuan bukan spesialis penjaga dapur. Pada saatnya, ketika negara membutuhkannya, dengan semangat menunaikan dharma, perempuan Bali akan turun gelangang bersama mitra sejawatnya, kaum lelaki.

IV. Aspek Penguatan Perempuan Bali

A. Regulasi

Yang dimaksud dengan regulasi dalam penelitian ini adalah Inpres No 9/2000. Keberadaan kebijakan pemerintah ini bertujuan agar terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pengarusutamaan gender dilaksanakan dengan: analisis gender dan upaya komunikasi, informasi, dan edukasi tentang pengarusutamaan gender pada instansi dan lembaga pemerintahan di tingkat pusat dan daerah. Dalam kaitannya dengan perempuan Bali, aspek regulasi yang diharapkan adalah regulasi yang disesuaikan dengan budaya Bali agar pemberdayaan dan utamaan gender terlaksana dengan baik.

B. Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor penting dalam kehidupan individu karena sangat menentukan kualitas sumber daya manusia (SDM) Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, semakin tinggi pula kualitas SDM-nya. Secara normatif tampak bahwa kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan, baik pendidikan dasar, pendidikan menengah, maupun pendidikan tinggi tidak menunjukkan adanya diskriminasi gender. Namun, dalam realitasnya kesenjangan gender di Bali cukup tinggi, terutama pada ang pendidikan menengah atas dan

perguruan tinggi. Untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, kondisi seperti ini perlu diatasi antara lain dengan melakukan sosialisasi gender di berbagai lapisan masyarakat, sehingga nilai-nilai sosial budaya yang bersifat merugikan atau kurang mendukung kemajuan perempuan bisa diperbaiki. Data di bawah ini memperlihatkan bahwa kesenjangan di bidang pendidikan masih ada

Persentase Pendidikan Tertinggi Penduduk 10 Tahun ke Atas di Provinsi Bali menurut Daerah dan Jenis Kelamin, 2004

No	Ijazah yang dimiliki	2004					
		Kota			Desa		
		L	P	Jml	L	P	Jml
1	Tidak Tamat SD	14.67	16.94	15.75	22.87	26.65	23.59
2	SD	22.92	29.53	26.08	36.79	42.52	39.39
3	SLTP	16.8	17.93	17.34	14.78	14.27	14.55
4	SMU	28.18	23.49	26.47	17.22	10.46	14.15
5	SMK	6.01	5.06	5.56	4.38	3.36	3.91
6	D1/D2	2.75	1.59	2.2	1.3	1.17	1.24
7	D3/Sarjana Muda	1.98	1.39	1.7	0.55	0.55	0.55
8	D4/S1/S2/S3	5.67	4.06	4.9	2.11	1.02	1.61
	Jumlah	100	100	100	100	100	100

Sumber: Statistik Pendidikan Provinsi Bali, 2004

Setiap kebijakan dan kegiatan pembangunan yang dicanangkan akan dapat mencapai hasil yang maksimal apabila dalam pelaksanaannya didukung oleh semua pihak demikian halnya dengan upaya pengarusutamaan gender dibidang pendidikan. Sosialisasi gender dikembangkan tidak hanya dalam tataran formal kantor atau sekolah namun bisa dikembangkan dalam pendidikan di keluarga dan masyarakat luas.

C. Organisasi

Pendidikan modern yang diintroduksi oleh pemerintah kolonial Belanda di Bali ternyata membuka mata masyarakat, termasuk kaum perempuan untuk melakukan perlawanan kepada penjajah melalui cara yang lebih baik, misalnya (PBS), dengan membentuk organisasi modern organisasi Putri Bali Sadar misalnya, menjadi wahana modern pertama bagi kaum perempuan Bali untuk memperjuangkan nasib kaumnya dengan memperluas pendidikan dan memperjuangkan nilai-nilai baru dalam kesusilaan, perikemanusiaan menuju pada usaha meninggikan derajat kaum perempuan.

Aktivitas kaum perempuan Bali dalam bidang politik terus tampak pada masa perjuangan kemerdekaan. Mereka turut mempertahankan kemerdekaan pada masa revolusi fisik hingga di zaman kemerdekaan.

Pada masa pemerintahan orde Baru terjadi usaha yang sistematis untuk mendelegitimasi partisipasi perempuan dalam kegiatan-kegiatan politik. Dengan menggunakan konsep kodrat, pemerintah Orde Baru mengkonstruksi sebuah ideologi gender yang mendasarkan diri pada Ibuisme, sebuah paham yang melihat kegiatan ekonomi perempuan sebagai bagian dari perannya sebagai ibu dan partisipasi perempuan dalam politik sebagai hal yang tidak layak. Dalam usahanya memperkuat politik gender pemerintah Orde Baru merevitalisasi dan mengelompokkan organisasi-organisasi perempuan untuk membantu pemerintah dalam menyebarkan ideologi gender seperti: Dharma Perempuan, Dharma Pertiwi, dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga. Ketiadaan organisasi yang independen bagi kaum perempuan mengakibatkan kaum perempuan khususnya di

Bali berada dalam posisi ter subordinasi dan terpinggirkan dalam dunia politik selama rezim Orde Baru berkuasa.

Bali yang dikenal sebagai Pulau Dewata, merupakan salah satu propinsi kebanggaan bangsa Indonesia Masyarakatnya yang dikenal ramah dengan budayanya yang tinggi membuat Bali menjadi pusat tujuan para turis mancanegara dan turis lokal. Membanggakan juga (bagi masyarakat Bali) sekaligus ironis (bagi bangsa Indonesia) bahwa Bali lebih dikenal dunia ketimbang Indonesia. Ini menunjukkan bahwa Bali menyimpan potensi wisata luar biasa yang dapat menyedot minat wisatawan dari seluruh penjuru dunia.

Sebagaimana telah diketahui bersama, peristiwa Tragedi Bom Bali I dan II, yang cukup banyak menelan korban jiwa, telah membuat bangsa Indonesia, khususnya rakyat Bali, cukup menderita. Berkurang drastisnya jumlah turis yang datang di Bali tentu membawa dampak cukup signifikan bagi pendapatan daerah dan khususnya pendapatan masyarakat perajin dan pedagang kecil menengah. Meskipun demikian, dengan semangat dan kegigihan masyarakatnya, Bali dapat bertahan. Hal ini juga merupakan hasil kerja keras dari perempuan Bali melalui organisasi-organisasi wanitanya yang bekerja sama dengan pemerintah daerah secara bahu-membahu dalam melaksanakan program pemberdayaan ekonomi yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat.

Organisasi perempuan Bali saat ini seperti Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) dan Iwapi (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia) dapat menjadi asisten atau pembina bagi para perajin, khususnya perempuan perajin terutama dalam memberikan akses kepada permodalan dan pemasarannya.

Dengan demikian, mereka dapat berkembang lebih maju dan dapat terus meningkatkan produktivitas, kreativitas, serta inovasi anggotanya, dan pada gilirannya juga meningkatkan kesejahteraannya, sehingga kelak dapat menjadi mitra pemerintah yang mandiri terutama dalam mengangkat perekonomian daerah yang akan berdampak positif bagi peningkatan ekonomi nasional.

Melalui program-program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh organisasi perempuan, misalnya Dharma Wanita, dalam membantu pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, Dekranasda dan PKK sudah mulai aktif kembali terutama dalam pemberdayaan ekonomi perempuan revitalisasi Posyandu, dan program kesejahteraan keluarga. Demikian juga dengan kehadiran Dharma Wanita dengan program pendidikannya (pemberantasan buta aksara), semua anggota masyarakat yang tergabung dalam organisasi wanita atau pun secara individu telah membantu pemerintah dengan program pemberdayaan masyarakat.

Karakter perempuan Bali yang koh ngomong kurang memiliki keberanian (malu-malu dalam menunjukkan bahwa sesungguhnya mereka mampu. Hal ini masih ditemukan pada perempuan Bali. Sifat tersebut merupakan tantangan yang sangat menantang ditujukan kepada LSM baga sosial masyarakat) yang bergerak dalam pengorganisasian perempuan agar tujuan organisasi yang sesungguhnya bisa tercapai.

D.Kesempatan Karier

Peluang kerja di luar pekerjaan domestik cukup banyak buat perempuan dimasyarakat, apalagi setelah Bali dinyatakan sebagai daerah pariwisata. Kalau hanya sebatas menjadi pekerja, pendidikan sekolah yang meningkatkan pengetahuan perempuan sudah memadai. Tetapi, kalau ada keinginan untuk mendapatkan peluang lebih besar dan lebih tinggi, diperlukan kemampuan berorganisasi dan bersosialisasi. Kemampuan membaca peluang tidak hanya diperoleh dari ilmu pengetahuan, tetapi bisa juga dari kreativitas seseorang yang harus dilatih sejak dini.

Karier adalah keahlian yang diamalkan di masyarakat atau dijadikan sumber kehidupan. Umumnya karier bertujuan mendapatkan sejumlah uang sebagai pendukung diri atau keluarganya, sebagai usaha seseorang mengembangkan dan memajukan dirinya dalam menjalani suatu pekerjaan untuk mendapatkan suatu penghargaan atau penghasilan. Jika demikian, sesungguhnya peluang perempuan untuk memasuki dan mengembangkan kariernya cukup lapang. Akan tetapi, banyak perempuan tidak menyadari bahwa apa pun yang dilakukan itu bisa dianggap dan dimasukkan sebagai karier sepanjang mereka mau berusaha meningkatkan kemampuannya, mempergunakan kemampuannya untuk mendapatkan sesuatu. Selama ini banyak orang (termasuk perempuan Bali) yang beranggapan bahwa karier hanya sebatas suatu apa yang bisa diperoleh di bidang politik, ekonomi, seni, dan umumnya dihubungkan dengan pekerjaan di kantor, pemerintahan, atau perusahaan. Tentu saja, pandangan ini terlalu sempit. Padahal, pekerjaan sebagai ibu rumah tangga pun bisa diangkat sebagai sebuah

karier dan bukan hanya merupakan pengetahuan tugas-kalau mau membekali diri dengan pengetahuan luas seperti kepemimpinan, psikologi perkembangan, memasak, yang menata kebun, dll. Pekerjaan ini sudah menjadi pekerjaan profesional yang menjanjikan.

Tidak diragukan lagi daya juang perempuan Bali untuk melangsungkan kehidupan. Amat jarang perempuan Bali pengangguran atau tidak bekerja. Setidak-tidaknya, perempuan Bali membantu meringankan beban keluarga dalam hal penghasilan dan ekonomi. Karier yang dimaksudkan di sini adalah karier yang dikerjakan baik di dalam rumah maupun meninggalkan rumah. Fenomena di lapangan membuktikan bahwa apabila ada kesempatan, perempuan Bali tidak akan menyia-nyiakan kesempatan itu. Sepanjang perempuan itu memiliki keberanian dan tidak terlalu mempermasalahkan aspek sosial budaya atau tidak menganggap sosial budaya sebagai hambatan, selama itu pula perempuan Bali berpeluang besar untuk mengembangkan kariernya.

V. Aspek Pengembangan Budaya/Adat

A. Hukum Waris

Sistem kekerabatan patrilineal pada dasarnya memandang bahwa anak laki-laki mempunyai nilai lebih tinggi dan lebih penting dalam kehidupan keluarga dibandingkan dengan anak perempuan. Anak laki-laki dianggap sebagai penerus keturunan dan sebagai pewaris sehingga harapan keluarga di masa depan baik dalam hal ayahan (kewajiban di desa adat), pemeliharaan di tempat suci,

pengabenan (pembakaran mayat ada di pundak anak laki-laki. Sementara anak perempuan tidak mempunyai kewajiban yang demikian karena setelah anak perempuan menikah maka secara hukum adat Bali dianggap putus hubungan atas hak dan kewajibannya terhadap orang tua kandungnya dan selanjutnya menjadi tanggung jawab suaminya. Hukum adat waris Bali memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses pengoperan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (material dan immaterial) dari suatu angkatan manusia generasi kepada turunan laki-laki dan perempuan yang berstatus laki-laki (purusa). Menurut ketentuan awig-awig (peraturan), dapat diketahui bahwa ahli waris adalah keturunan laki-laki dan penggantian tempat dalam warisan yang juga melalui mengutamakan garis laki-laki. Secara substansial, ketentuan awig-awig tersebut bersifat patrilineal dan menunjukkan ketentuan yang bias gender/bias laki-laki. Ketentuan normatifnya sebagai semacam produk hukum positif menampakkan ketentuan yang diskriminatif.

Ahli waris mempunyai hak terhadap harta warisan dan selanjutnya juga berkewajiban untuk:

1. menerima serta mengusahakan warisan dari leluhurnya dengan kewajiban untuk memelihara pemerajan (empat pemujaan/tempat sembahyang membuatkan upacara, serta mengganti ayah-ayahan kewajiban) pewaris
2. melaksanakan upacara pitra yadnya untuk pewaris;
3. membayar hutang-hutang pewaris.

Dengan demikian, menjadi ahli waris, yang menerima harta warisan, sesungguhnya tidak berarti enak. Dalam hukum waris Bali, ahli waris bukan hanya mewaris hak, tetapi juga mewarisi kewajiban. Bahkan, lazimnya menurut nilai etika Bali, kewajiban sebagai ahli waris harus lebih didahulukan daripada hak.

Dilihat dari segi harta warisan, ada sistem kewarisan kolektif dan individual. Pada sistem kewarisan kolektif harta warisan diwarisi secara bersama sama oleh para ahli waris, seperti harta pusaka, kekayaan yang bernilai religius, harta kekayaan keluarga yang berupa duwe tengah (milik keluarga besar) dalam satu lingkungan sanggah gede (keluarga besar).

B. Partisipasi / Kesempatan Bicara

Dalam konteks lingkungan Bali, hukum adat masih dominan berlaku. Di banjar (desa adat), tidak ada anggota inti perempuan. Hal ini akan berdampak tidak akan pernah ada perempuan yang ikut terlibat mengambil keputusan di banjar. Perempuan tidak pernah disertakan dalam sangkep banjar (rapat desa). Sebenarnya ada istilah sentana rajeg atau kawin nyeburin, wanita berstatus sebagai pria, begitu pula sebaliknya. Namun, dalam adat-istiadat Bali, lelaki akan tetap menjadi anggota banjar. Dengan kata lain, meskipun status perempuan sebagai purusa (laki-laki), tetap saja laki-laki yang menghadiri sangkep banjar tersebut.

Nah, dalam paruman-paruman (rapat-rapat mengenai adat) banjar, perempuan tidak pernah diikutsertakan. Kalau memang perempuan di banjar itu punya pemikiran-pemikiran moderat yang bisa diadopsi untuk menyusun suatu

kebijakan, kenapa tidak? Ke depan mestinya ada terobosan seperti itu. Legislatur perempuan sedikit suaranya, baru beberapa orang perempuan menjadi anggota DPRD di provinsi maupun kabupaten/kota di Bali. Seharusnya mereka yang segelintir tersebut mampu menunjukkan kinerja sebagai anggota legislatif yang membawa aspirasi masyarakat, namun nyatanya hampir tak berperan. Di Bali, peran perempuan dikalahkan adat yang sangat kental dan tidak bisa lepas dari perempuan. Anggapan adat Bali akan tersingkir sedikit demi sedikit jika perempuan berperan penuh bekerja di sektor pemerintahan.

Bagaimana agar adat dan perempuan sama-sama jalan perannya? Di banjar tidak ada peraturan perempuan tidak boleh ngayah banjar, tetapi umumnya yang sangkep laki-laki. Kondisi ini masih menandakan bahwa kaum laki-laki mendominasi perempuan. Perspektif gender, tidak melihat hanya perempuannya, tetapi juga laki-laki, sebab kepentingan keduanya sama, baik pendidikan maupun sebagai tenaga kerja, dll saat ini hampir tak ada keluarga yang hanya bisa hidup dari satu sumber pendapatan> Harus kedua-duanya yang beruang untuk semua kebutuhan. Memang suami istri merupakan satu kesatuan, namun bukan dalam bentuk istri mengurus rumah tangga saja dan suami berkiprah di luar rumah.

C. Personifikasi Dewi/Symbolisasi Perempuan

Menurut kepercayaan Hindu Bali, dewa adalah manifestasi Ida Sanghyang Widhi Wasa (Tuhan Yang Mahaesa). Dalam manifestasinya, dewa memiliki sakti (istri), yaitu dewi. Masyarakat Bali memandang bahwa para dewa dan dewi itu mendapatkan penghargaan sama dari penganutnya. Tidak ada yang memandang Dewi Saraswati, misalnya, lebih rendah dari suaminya, Dewa Brahma. Semuanya

dihormati sama bergantung pada posisi dan kemampuannya. Jadi, di masyarakat Bali tidak ada perbedaan dalam peranan antara perempuan dan laki-laki, yang berbeda hanyalah fungsinya.

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat memberi penghargaan yang besar pada perempuan. Hal ini dapat dilihat dari pemujaan yang ditujukan kepada dewi yang dianggap dapat membantu kehidupan manusia di dunia ini. Pemujaan sebagai tanda bakti dan terima kasih dipersembahkan untuk Dewi Sri (dewi padi) yang merupakan sumber kehidupan manusia.

Pemujaan sebagai tanda bakti dan terima kasih juga ditujukan kepada Dewi Saraswati (dewi pengetahuan) yang dilambangkan sebagai seorang bertangan empat, berdiri di atas bunga teratai. Ia merupakan simbol perempuan yang harus diteladani karena dengan tasbih di tangan pertama, ia menyembah Hyang Widhi Wasa, dengan daun lontar di tangan kedua ia mendalami ilmu pengetahuan, dengan alat musik di tangan ketiga ia menikmati dan mengumandangkan keindahan dan seni, dan dengan sekuntum bunga di tangan keempat ia menyebarkan keharuman dan kelembutan. Dewi Saraswati berdiri di atas bunga teratai melambangkan ia sebagai perempuan mampu berdiri di dalam situasi apa pun.

Dewi Durga, istri Dewa Siwa, mempunyai kekuatan magis yang luar biasa yang dapat memberi kekuatan dan menghancurkan kehidupan ini. Sri Sedana merupakan Dewi Uang yang mempengaruhi perekonomian seseorang. Pemujaan yang dilakukan masyarakat Hindu terhadap dewi-dewi itu menggambarkan bahwa

masyarakat Bali Hindu memberi penghormatan dan pemujaan yang sama terhadap dewi dan dewa keduanya mempunyai tugas dan kemampuan yang berbeda. Demikian juga dalam cerita pewayangan, arja, topeng, dan cerita-cerita rakyat banyak ditonjolkan peran perempuan yang tangguh, mandiri, berpengetahuan luas dan mampu menjadi permaisuri atau ratu yang disegani oleh rakyatnya.

VI. Model Kebijakan Pemberdayaan Perempuan di Bali

Berdasarkan pembahasan di muka, dapat ditarik model kebijakan perempuan Bali sebagai berikut.

1) Kebijakan pemerintah terhadap pemberdayaan perempuan telah diupayakan sedemikian rupa dari tingkat Presiden, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan di pusat, provinsi, dan di kabupaten/kota, namun kebijakan tersebut belum menunjukkan hasil yang signifikan. Di Bali sendiri ternyata belum ada Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang gender. Praktis, kesenjangan gender dalam pemberdayaan masih terjadi, sehingga kebijakan publik tentang pemberdayaan perempuan harus terus diimplementasikan dengan makin membuka peluang untuk terlibat berpartisipasi setiap stakeholder.

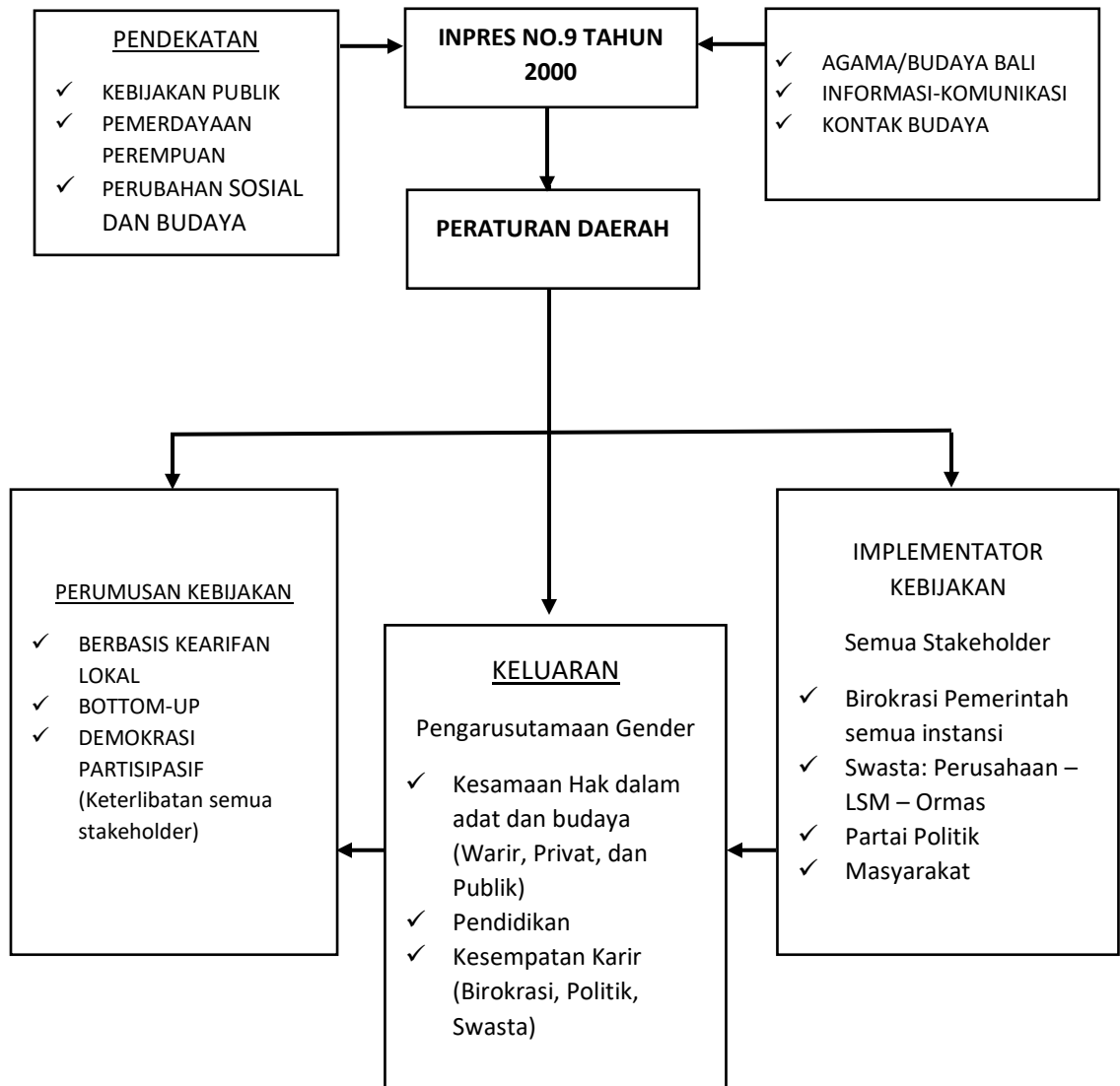
2) Telah terjadi perubahan persepsi dan konsepsi perempuan Bali tentang konsep dirinya. Sejauh ini mereka tidak melakukan gerakan secara ekspresif dan atraktif. Perubahan budaya dan sikap perempuan terjadi secara evolusioner yang adaptif terhadap pengaruh global. Perubahan itu tidak mengubah sistem budaya yang mereka pegang dan anut. Perubahan tersebut terjadi pada sisi perilaku mereka dengan pergerakan secara alamiah. Bagi perempuan Bali, gerakan feminisme yang

dilakukan secara terbuka, radikal, dianggap tabu dan bertentangan dengan ajaran agama, budaya, dan adat istiadat. Mereka lebih memilih pergeseran peran perempuan secara diam- diam, namun berdaya efektif dan semakin kuat di ranah publik dengan tidak merusak sistem yang dianut bersama, sehingga pada akhirnya diakui dan diterima oleh masyarakat.

Dengan demikian model kebijakan pemberdayaan perempuan Bali tersajikan sebagai berikut:

Gambar 1

Model Kebijakan Pemberdayaan Perempuan Bali



A. Prinsip-prinsip Mekanisme Kebijakan

Pertama, prinsip mekanisasi Perumusan mekanisme model kebijakan pemberdayaan perempuan Bali adalah persoalan merumuskan hubungan mekanis antar berbagai pihak dalam proses kebijakan. Hubungan mekanis ini memungkinkan proses kebijakan bergulir mengingat aksi seorang aktor atau suatu agensi/lembaga/organisasi akan direaksi oleh pihak yang lain. Ini berarti bahwa:

1) Yang perlu dirumuskan dalam mekanisme bukan hanya kausalitas normatif (entah mengikuti norma demokrasi, norma masyarakat lokal atau norma apa) namun juga kausalitas aksi reaksi. Sebagaimana dicontohkan di atas, proses kebijakan pemberdayaan perempuan Bali tidak bergulir manakala mekanisme baru yang dirumuskan dalam UU/Perda tidak diyakini masyarakat akan bisa diterapkan. Kalau mereka tetap saja apatis terhadap mekanisme yang ada maka dominasi pejabat dalam proses kebijakan tetap berlangsung, dan agenda pengembangan partisipasi akan gagal.

2) Mekanisme tidak cukup difahami secara tatanan prosedural, namun juga perangkat antisipasi dinamika sosial. Tidak adanya mekanisme yang jelas menyebabkan proses kebijakan sarat dengan konflik dan kekerasan. Dengan adanya mekanisme yang baku dan diterima dan diakui para pelaku, maka masing-masing yang terlibat dalam proses kebijakan bisa mengadu siasat, namun pada akhirnya dia harus tunduk pada apapun yang dicapai dalam mekanisme tersebut. Sebaliknya, kesalahan masa lalu yang melebih-lebihkan arti penting mekanisme sampai-sampai menganggap mekanisme tersebut berubah sekedar sebagai formalitas, perlu dihindari.

3) Pengembangan partisipasi harus menjangkau aspek supply (peluang untuk berpartisipasi) maupun aspek demand (gerakan sosial-politik untuk ikut mempengaruhi keputusan kebijakan pemerintah). Hal ini hanya bisa ditegakkan kalau: (1) pemerintah maupun masyarakat sanggup menegakkan aturan main. Mekanisme itu sendiri pada dasarnya adalah aturan main (2) modal sosial yang ada selama ini ikut didayagunakan.

Kedua, prinsip pengelolaan perubahan sosial, Dalam hal ini ada dua persoalan:

1) Apakah kita mulai dari level mikro (aktor) untuk mengubah mekanisme, ataukah sebaliknya, sejumlah perubahan makro ditempuh duluan untuk memungkinkan kiprah pada level mikro bisa berlangsung mulus. Sebagai mana telah dikemukakan, mekanisme model kebijakan pemberdayaan perempuan Bali didudukkan sekedar sebagai salah satu pilar pengembangan proses kebijakan yang memberdayakan perempuan Bali. Mekanisme ini bisa dilahirkan oleh periuangan aktor-aktor multi pihak yang kemudian sepakat untuk membakukan rumusan dan membiasakan diri untuk mematuhi. Hal yang sebaliknya juga bisa terjadi. Berbagai perombakan makro struktural dilakukan yang pada gilirannya berbuntut memfasilitasi perubahan-perubahan mikro. Sehubungan dengan persoalan ini maka: (1) pengembangan mekanisme tidak cukup diserahkan pada perumusan ketentuan yuridis, (2) jaminan yuridis administratif yang diperoleh harus dikawal dengan aksi-aksi dan sejumlah "rekayasa" dalam rangka pembiasaan terhadap mekanisme baru (3) Aktor-aktor yang menduduki posisi struktural dalam tubuh negara maupun

dalam masyarakat perlu didorong untuk mendayagunakan posisi struktural tersebut untuk pembudayaan mekanisme baru.

2) Persoalan yang kedua adalah bagaimana inovasi awal bisa menggelinding laksana bola salju. Untuk itu advokasi lintas pihak yang sudah tergalang perlu bentuk dan kemudian didayagunakan Komunikasi lintas pihak, katakanlah antara aktor dalam tubuh negara dengan aktor dalam masyarakat, bisa menghasilkan sinergi yang. kalau dikelola dengan baik, bisa menjamin sustainabilitas.

Penutup

Model Kebijakan Pemberdayaan Perempuan Di Bali menghasilkan kesimpulan sebagai berikut.

1. Pemberdayaan perempuan di Bali tidak luput dari perubahan di era globalisasi ini. Di satu sisi perempuan Bali cenderung mengadopsi kebudayaan modern yang mendunia (kosmopolitan), namun di sisi lain juga sedang mengalami proses parokialisme yang timbul karena fokus beralih pada lokalitas, khususnya kepada desa adat. Dengan kata lain, dalam mengadopsi budaya modern perempuan Bali tampaknya masih tetap berpegang kepada ikatan-ikatan tradisi dan sistem nilai yang dimilikinya. Masyarakat Bali tidak membedakan perbedaan peran antara perempuan dan laki-laki, tetapi membedakan fungsi antara perempuan dan lelaki. Hukum adat Bali di bidang kekeluargaan dan waris sangat bias gender, yang hanya mengutamakan hak waris kepada anak

laki laki. Namun, harus diingat bahwa biarpun perempuan tidak memiliki hak waris, perempuan juga tidak dituntut memenuhi kewajiban yang timbul karena waris tersebut. Biarpun menerima waris, anak lelaki otomatis terbebani dengan kewajiban yang tidak ringan. Bila prinsip equality diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai kesetaraan (tidak harus sama) hukum adat Bali telah mengatur kesetaraan hak dan kewajiban antara anak laki-laki dan perempuan. Upaya mengikis ketidakadilan gender dalam kehidupan masyarakat Bali dapat dilakukan melalui perubahan perilaku; baik di lingkungan keluarga, lingkungan sosial, maupun lingkungan birokrasi pemerintahan, agar lebih memberdayakan perempuan, sehingga membantu para perempuan lebih mandiri, baik dari segi moral psikologis, ekonomi, pendidikan, dan politik, serta menciptakan budaya baru yang sensitif gender. Hanya dengan kemandirian perempuan dalam semua aspek kehidupan, keadilan gender dapat diwujudkan.

2. Telah terjadi perubahan persepsi dan konsepsi perempuan Bali tentang konsep dirinya (selfconcept. Sejauh ini mereka tidak melakukan gerakan secara ekspresif dan atraktif Perubahan budaya dan sikap perempuan terjadi secara evolusioner yang adaptif terhadap pengaruh global. Perubahan itu tidak mengubah sistem budaya yang mereka pegang dan anut; perubahan terjadi pada sisi perilaku mereka dengan pergerakan secara alamiah. Bagi perempuan Bali, gerakan feminisme yang dilakukan secara terbuka dianggap tabu dan bertentangan dengan ajaran agama, budaya, dan adat istiadat Mereka lebih memilih pergeseran peran perempuan secara diam-diam, namun berdaya

efektif, dan semakin kuat di ranah publik dengan tidak merusak sistem yang dianut bersama, dan pada akhirnya diakui dan diterima oleh masyarakat.

3. Penelitian tentang Model Kebijakan Pemberdayaan Perempuan Di Bali" ini menghasilkan model kebijakan yang berbasis kearifan lokal, bottom up, demokrasi partisipatif (keterlibatan semua stakeholder). Dengan model seperti ini, maka kebijakannya akan lebih adaptif fleksibel dan dapat diterima oleh masyarakat Bali sehingga pemberdayaan akan lebih efektif.
4. Perumusan Peraturan Daerah apa pun yang bersangkutan dengan kebijakan pemberdayaan perempuan Bali harus mengacu pada kearifan lokal (local wisdom) dengan tetap mempertimbangan perubahan budaya Bali yang terjadi secara alamiah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Emma S. 2006. Menteri Pemberdayaan Perempuan *Jurnal Perempuan*. 09.
- Arjani, Ni Luh, I Nyoman Suparwa, I Ketut Sudantara. 2006. *Kembang Rampai*. Denpasar: CV Karya Sastra
- Budiman, Arief. 1991. "Ketergantungan Perempuan dan Manifestasinya: Kajian Pustaka". Hal. 19-27 dlm. Hesti R. Wijaya et al.(ed.), *Kemandirian Perempuan Indonesia: Citra Kemandirian Perempuan Indonesia*. Malang; Kelompok Studi Wanita, Puslit Unibraw.
- Cozens, J. & M. West. (eds.). 1991. *Women in Work, Psychological and Organizational Perspective*.
- Davidson dan Cooper. 1992. *Women on Business*.
- Dunn, William N. 1999. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dye, Thomas R. 1978. *Understanding Public Policy*. Engelwood Cliffs, NJ.: Prentice Hall

- Fakih, Mansour. 2005. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Farida, Anik dan Musdah Mulia. 2005. *Perempuan dan Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Friedmann. 1992. *Empowerment: The Politics of Alternative Development*. Cambridge: Mass-Black Well Piblisher.
- Islamy, M. Irfan. 2007. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jensen, G.D. & L.K. Suryani. 1996. *Orang Bali*. Bandung: ITB & Unud.
- Jones, Charles O. 1970. *An Introduction to the Study of Public Policy*. Belmont, CA: Wadsworth.
- Mazmanian, Daniel, and Paul A. Sabatier (eds), 1981, *Effective Policy Implementation*, Lexington Mass DC: Heath.
- Mead, Margaret and Samoa. 1998. *Women and Culture in Samoa*.
- Oka, Jasmin. 2002. *Garis Baru Bagi Perjuangan Wanita Indonesia*.
- Pitana, I Gde. 1994. *Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Bali*. Denpasar:BP
- Santoso, Purwo Workshop Multistakeholder *Membangun Mekanisme Pembuatan Kebijakan Daerah yang Partisipatif* yang diselenggarakan oleh Jogjakarta Transparency, bekerja sama dengan Independent Legal Aid Institute (ILAI) dan Partnership for Governance Reform di Hotel Novotel Yogyakarta pada tanggal 20 Januari 2003.
- Sukiada, I Nyoman, 2002. *Politik Gender Orde Baru dan Keterpinggiran Perempuan Bali dalam Kancah Politik*.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom & Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Citra Utama.
- Suryani, Luh Ketut 2002. "Balinese Women in a Changing Society". *Journal of the American Academy of Phychoanalysis and Dynamic Psychiarty*, Vol. 32.
- Suryani, Luh Ketut. 2003. *Perempuan Bali Kini*. Bali:BP.
- Swarsi, 1985. *Perempuan dalam Hukum Hindu*.

Penulis Dosen Magister Administrasi Publi Universitas Ngurah Rai